

Judul : Citilink Sosialisasikan Bagasi Berbayar
Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019
Surat Kabar : Jakarta Post
Halaman : 5

Citilink Sosialisasikan Bagasi Berbayar

DPR Ngotot Minta Ditunda

JAKARTA - Maskapai Citilink Indonesia tetap bakal melakukan sosialisasi penerbangan bagasi berbayar. Perusahaan tidak menggubris permintaan DPR yang meminta aturan tersebut ditunda. "Sosialisasi jalan terus tidak apa-apa. Masalahnya, pemberlakuan (penundaan) kapan ya itu, saya belum tahu," tutur Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).

Juliandra mengatakan pihaknya menunggu keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait usulan DPR tersebut. "Kita lihat nanti, saya enggak bisa bicara saya harus, saya harus bicara dengan Bu Dirjen dulu," tukasnya.

Ia menilai semua masukan bisa dipertimbangkan, termasuk usulan penundaan bagasi berbayar. "Namanya masukan, kita pertimbangkan," tukasnya.

Komisi V DPR meminta pemerintah menunda pemberlakuan bagasi berbayar. Saat ini, bagasi berbayar sudah berjalan misalnya maskapai Lion Air, Wings Air, dan berikutnya akan diterapkan di maskapai Citilink Indonesia. "Kami mendesak Kemenhub, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menunda pemberlakuan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," tutur anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo saat Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub.

Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat. Sigit menambahkan pihaknya juga meminta Kemenhub untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memformulasi

ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur serta bea masuk suku cadang.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahmat

Nasution menilai maskapai berbiaya hemat (LCC) seharusnya difasilitasi secara khusus baik itu terminal khusus maupun insentif agar memberi ruang untuk mengurangi biaya operasi, sehingga bagasi tidak dikenakan tarif. "Dari kedatangan pesawat diberi insentif pajak, suku cadang, dari hulu sudah dimainkan regulasi-nya. Saya pikir ini dikaji pemerintah agar bisa bilang sudah diberi segala macam, kamu jangan seenaknya-enaknya (kenakan tarif bagasi)," ujarnya.

Sementara anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Intan Fitriana Fauzi menilai tidak ada peraturan yang melanggar maskapai terkait penerapan bagasi berbayar.

Namun, perlu sosialisasi yang menyeluruh

untuk masyarakat. "Itu semua tidak ada satu pelanggaran dari regulasi yang dilakukan maskapai berbiaya murah, semua sudah diatur undang-undang, tarif bagasi ini ada aturannya, hanya saja saya katakan dalam pengambilan kebijakan, sosialisasi ini dilakukan jauh hari sebelumnya," katanya.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan pihaknya akan meninjau lagi antara tarif batas penerbangan berbiaya hemat diakumulasikan dengan tarif bagasi 15 kilogram (kg). "Kami akan memberlakukan aturan, misalnya untuk tarif batas LCC ditambah bagasi berbayar 15 kg tidak boleh melebihi tarif batas medium service," katanya.

Dia menjelaskan bagasi memang tidak termasuk dalam komponen tarif. "Tapi akan kami perhatikan hal-hal tersebut supaya lebih operasional antara bagasi yang berbayar dan yang tidak. Yang jelas kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari PM 14 sampai PM 185," imbuhnya. (ant)

NEWS



UPDATE